



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**TAHUN ANGGARAN
2022**



BAB. I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran, kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang digunakan sebagai bahan kebijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

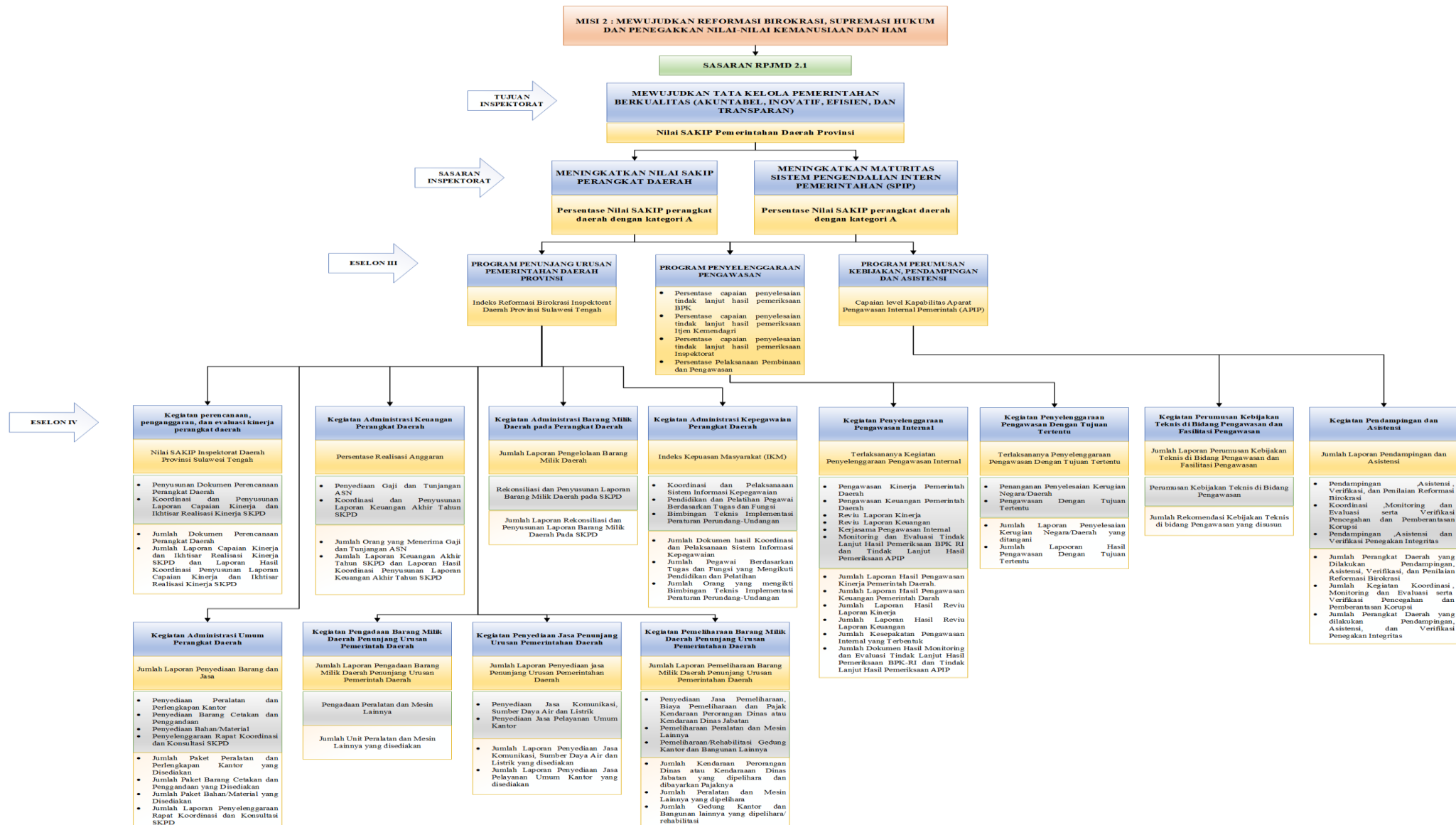
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Daerah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1 Cascading Kinerja

Cascading Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 12 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, yakni :

➤ Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan / atau Menteri;
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

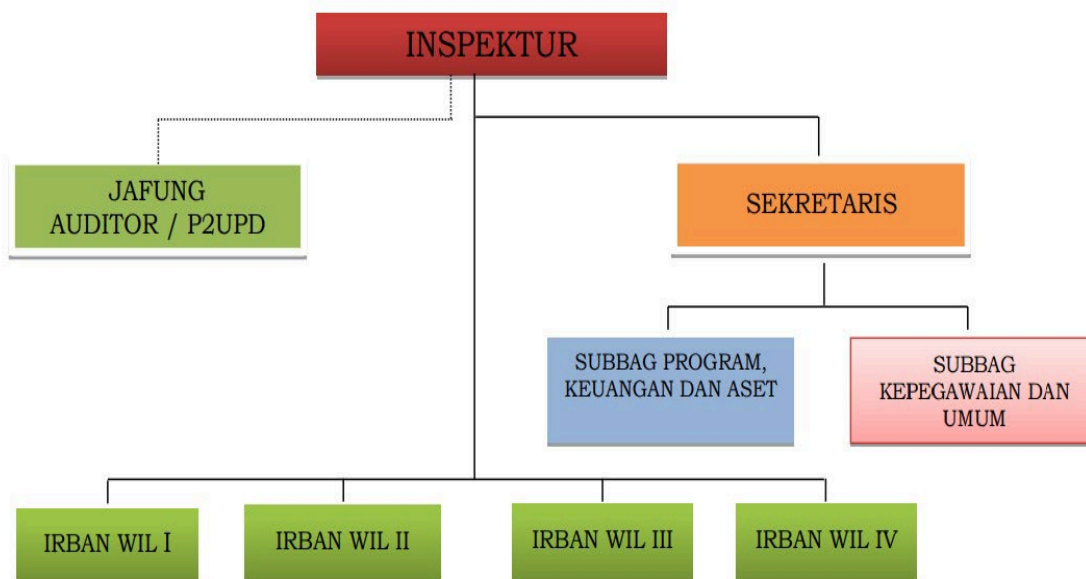
➤ **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

1. Inspektur;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program Keuangan dan Asset;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Susunan Organisasi Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

*(Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat)*



1.3 Isu – Isu Strategis

Memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh informasi – informasi mengenai berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara internal dan mencermati aspek – aspek atau faktor – faktor mengenai berbagai peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal dalam kerangka pelaksanaan mandate dan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan menggunakan metode analisis SWOT ini, dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya, dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni :

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
1. Ketersediaan sarana/alat pengawasan dan Sumber Daya Manusia	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2. Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2. Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independent
3. Inspektorat sebagai Pemjamin Mutu (Quality Assurance) dan pemberian asistensi	3. Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
4. Tingginya animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4. Belum menerapkan system pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Rewaed and Punishment)
5. Penyerapan anggaran yang optimal	5. Kurangnya ketersediaan anggaran pengawasan

PELUANG (Opportinuties)	TANTANGAN (Threats)
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat	1. Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah
2. Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2. Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraph penjelasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Efektivitas dampak hasil pemeriksaan	3. Jumlah temuan/pelanggaran masih relative tinggi
4. Adanya penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas	4. Kapabilitas APIP pada level 2 dengan catatan dan sudah harus menuju ke level 3 penuh
5. Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5. Penyelesaian terhadap kasus pengaduan

➤ **Permasalahan Utama**

Permasalahan utama yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Masih banyaknya temuan-temuan yang berindikasi TPK (Hasil Pemeriksaan BPK RI), Inspektorat yang belum di tindak lanjuti;
2. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP;
3. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
4. Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah di OPD;
5. Masih belum optimalnya OPD dalam menerapkan SAKIP;
6. Belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh OPD.

1.4 Dukungan SDM Dan Sarana Prasana

➤ Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah asset bagi Suatu Organisasi dan sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.4.1
PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jabatan menurut Golongan, Pendidikan Tahun 2022

No	Jabatan	Golongan				Pendidikan						
		II	III	IV	Jml	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jml
1.	Struktural	-	-	8	8	-	-	-	-		8	8
2.	Fungsional Umum/ Pelaksana	5	15	3	23	-	-	6	-	13	4	23
3.	Fungsional Auditor	2	21	10	33	-	-	1	2	12	18	33
4.	Fungsional PPUPD	-	31	18	49	-	-	-	-	26	23	49
Jumlah		7	67	39	113	0	0	7	2	51	53	113

(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022)

Tabel 1.4.2
PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jabatan menurut Gender Tahun 2022

No.	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Struktural	6	2	8
2.	Fungsional Umum/ Pelaksana	11	12	23
3.	Fungsional Auditor	14	19	33
4.	Fungsional PPUPD	25	24	49
Jumlah		56	57	113

(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022)

Tabel 1.4.3
PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Penjenjangan Tahun 2022

No.	Latihan Penjenjangan	Jumlah	Keterangan
1.	Diklat PIM I	0	
2.	Spamen/Diklat PIM II	1	
3.	Spama/Diklat PIM III	9	
4.	Adum/Diklat PIM IV	15	
Jumlah		25	

*(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022)*

Tabel 1.4.4
Jabatan Fungsional menurut Gender pada Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	AUDITOR MADYA	3	8	11
2.	AUDITOR MUDA	8	9	17
3.	AUDITOR PERTAMA	0	2	2
4.	AUDITOR PENYELIA	1	-	1
5.	AUDITOR PELAKSANA	2	-	2
6.	PPUPD MADYA	8	10	18
7.	PPUPD MUDA	7	13	20
8.	PPUPD PERTAMA	9	2	11
JUMLAH		38	44	82

*(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022)*

➤ **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Tanah dan Gedung sendiri yaitu Tanah pada tanggal, 31 Desember 1992 dan Gedung pada tanggal 31 Desember 2004 terletak di Jalan Dewi Sartika No. 47 Palu merupakan Jalan Raya Kota Palu menuju ke Kabupaten Sigi. Tanah telah bersertifikat seluas 7316 M² Gedung seluas : 216 M² . Adapun Inventaris sarana

dan prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2022 sebagaimana terlampir.

1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021

Pengukuran Kinerja adalah Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun hasil pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021 adalah dengan nilai **71,74 %** dengan kategori **BB** hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal, namun dengan hasil tersebut masih banyak yang perlu ditingkatkan mengingat ada beberapa komponen yang masih bisa ditingkatkan guna meningkatkan manajemen kinerja yang terdiri dari ***Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja*** serta adanya perubahan aturan dari Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga banyak komponen-komponen yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 menuju lebih baik.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan tujuan Perangkat Daerah sebagai arah strategi menuju perbaikan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah, tujuan tersebut adalah ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan”***.

2.1.2 Sasaran

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) serta mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan output dengan outcome. Sehubungan dengan hal tersebut, Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pengawasan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku APIP telah melaksanakan kegiatan Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Secara umum, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun fokus dan sasaran pelaksanaan kinerja pendampingan dan pengawasan yang telah dilaksanakan ditahun 2022 yakni :

1. Audit Kinerja Berbasis Risiko Penurunan Kemiskinan;
2. Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Program Stunting;
3. Audit Ketaatan;
4. Pendampingan manajemen Risiko;
5. Audit Investigasi;
6. Pendampingan Wakil Gubernur Kunjungan Kerja ke Kabupaten;
7. Pendampingan Wakil Gubernur Kunjungan Kerja Peninjauan Proyek TA. 2022 di Kabupaten;
8. Evaluasi LPPD di Kabupaten 12 Kabupaten ;
9. Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
10. Evaluasi Kinerja terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
11. Monitoring Evaluasi Dana Desa Kabupaten;
12. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten TA. 2020;
13. Pendistribusian LHP di Kabupaten;
14. Reviu LPPD Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahap I, II, III, dan IV;

16. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah TA.2021;
17. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2023;
18. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Reviu Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
20. Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Reviu Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) TA. 2023;
22. Reviu Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender TA. 2023;
23. Evaluasi SAKIP OPD;
24. Pengawasan Vaksin Covid-19 Tahap VI (Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Covid-19) TA. 2022;
25. Monitoring Pengelolaan Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kadaluarsa TA. 2022;
26. Reviu Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Verifikasi SPJ Dana Operasional Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2021;
28. Reviu Akuntabilitas Pendapatan Daerah;
29. Pemeriksaan atas Penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
30. Reviu Kinerja Perizinan;
31. Reviu Kinerja Kepegawaian;
32. Audit dana BOS 12 Kabupaten;
33. Audit dana BOS Kota Palu;
34. Pemeriksaan Akhir masa Jabatan Bupati Banggai Kepulauan dan Bupati Buol;
35. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Reviu Standar Satuan Harga (SSH);
37. Probit Audit pada Biro PBJ Provinsi Sulawesi Tengah;

38. Reviu Satuan pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB) Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Reviu Laporan realisasi dan capaian Output Kegiatan DAK Fisik;
40. Pra Reviu Persetujuan Kontrak Kegiatan DAK Fisik;
41. Reviu DAK tahap I, II, III, dan tahap akhir Campuran;
42. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dana BOS Kabupaten/Kota;
43. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ITDA pada OPD di Kabupaten;
44. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri RI;
45. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
46. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian Teknis;
47. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ITDA pada OPD Provinsi Sulawesi Tengah;
48. Pemeriksaan atas Laporan Pengaduan/dugaan penyimpangan (Pemsus);
49. Audit Investigasi;
50. Pendampingan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN/siHarka);
51. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD dan Penjamin Mutu SPIP terintegrasi;
52. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi OPD;
53. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) UPP. Provinsi Sulawesi Tengah;
54. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi aksi Pencegahan Korupsi (MCP);
55. Pendampingan Kegiatan Penilaian Zona Integritas (ZI).

Tabel 2.1.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Indikator Kinerja
Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 s/d 2026

No.	Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)			Nilai Sakip Pemerintah Daerah Provinsi	74	77	81	83	86
			Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	10.42%	33.33%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3.20	Level 3.40	Level 3.50	Level 3.60	Level 3.70

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan setiap program/kegiatan/sub Kegiatan OPD. Untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

VISI :		Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
MISI 2	:	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1		2	3	4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)		Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Pengawasan Internal	Melaksanakan evaluasi SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Melaksankan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja
				Melaksankan Reviu Laporan Keuangan
				Melaksanakan Kerjasama Pengawasan Internal
				Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Melaksanakan Evaluasi atas implementasi SPIP Perangkat Daerah
				Melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko
				Melaksanakan koordinasi dan monitoring pencegahan tindak pidana korupsi
		Meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP	

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun kedepan. Adapun Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan strategi

dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Rencana Strategi 2021-2026 menetapkan:

Tujuan :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)”

Indikator Tujuan :

“Nilai Sakip Pemerintah Daerah Provinsi”

Sasaran :

1. Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah “
2. Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”

Indikator Sasaran :

1. Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A Evaluasi Nilai Reformasi Birokrasi OPD.
2. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kerja tahunan. Struktur Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2022

No.	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp)	DPA Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.188.093.275,00	3.408.565.675,00	220.472.400,00
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.996.995.775,00	3.319.068.425,00	322.072.650,00
		- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	115.158.000,00	118.908.000,00	3.750.000,00
		- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	455.478.625,00	120.213.625,00	(335.265.000)
		- Reviu laporan Kinerja	756.410.700,00	863.745.500,00	107.334.800,00

**LKjIP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp)	DPA Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		- Reviu laporan Keuangan	943.103.450,00	1.246.888.450,00	303.785.000,00
		- Kerjasama Pengawasan Internal	0,00	187.707.225,00	187.707.225,00
		- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	726.845.000,00	781.605.625,00	54.760.625,00
		- Reviu laporan kinerja	756.410.700,00	863.745.500,00	107.334.800,00
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	191.097.500,00	89.497.250,00	(101.600.250)
		- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	134.300.000,00	0,00	(134.300.000)
		- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	56.797.500,00	89.497.250,00	32.699.750,00
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	553.830.450,00	698.057.850,00	144.227.400,00
		Kegiatan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	36.346.900,00	144.726.900,00	108.380.000,00
		- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	36.346.900,00	144.726.900,00	108.380.000,00
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	517.483.550,00	553.330.950,00	108.380.000,00
		- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	300.375.525,00	339.963.925,00	39.588.400,00
		- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	182.970.025,00	181.554.025,00	(1.416.000)
		- Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi	34.138.000,00	31.813.000,00	(2.325.000)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data dukung struktur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan terkait langsung dengan pencapaian sehingga dapat disimpulkan dari anggaran tersebut belum memadai dalam pemenuhan capaian kinerja secara anggaran (operasional) sehingga sedikit banyak mengurangi capaian kinerja berdasarkan mandatori yang sudah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Adapun struktur program, kegiatan dan sub kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2022

No.	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp)	DPA Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.110.892.907,00	21.126.530.876,00	3.015.637.969,00
1.		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	81.113.450,00	81.113.450,00	0,00
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.148.450,00	79.148.450,00	0,00
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1,965.000,00	1,965.000,00	0,00
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.021.747.245,00	15.737.085.164,00	715.337.919,00
		- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14.867.867.245,00	15.583.205.164,00	715.337.919,00
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	153.880.000,00	153.880.000,00	0,00
3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.710.000,00	88.010.000,00	11.300.00,00
		- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.710.000,00	88.010.000,00	11.300.00,00

**LKjIP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp)	DPA Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	474.716.000,00	694.812.875,00	220.096.875,00
		- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	84.600.000,00	125.250.000,00	40.650.000,00
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	330.116.000,00	507.063.075,00	176.947.075,00
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	60.000.000,00	62.499.800,00	2.499.800,00
5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.598.921,00	901.734.096,00	404.135.175,00
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.810.846,00	5.810.846,00	0,00
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.483.075,00	19.152.250,00	5.669.175,00
		- Penyediaan Bahan / Material	195.000.000,00	198.000.000,00	3.000.000,00
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.305.000,00	678.771.000,00	395.466.000,00
6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	467.142.650,00	2.074.470.650,00	1.607.328.000,00
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	467.142.650,00	2.074.470.650,00	1.607.328.000,00
7.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1.311.004.641,00	1.307.864.641,00	(3.140.000)
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	342.455.256,00	343.055.256,00	600.000,00
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	968.549.385,00	964.809.386,00	(3.740.000)

No.	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp)	DPA Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
8.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	180.860.000,00	242.440.000,00	60.580.000,00
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.300.000,00	159.050.000,00	29.750.000,00
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	41.560.000,00	62.390.000,00	20.830.000,00
		- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.

Adapun Indicator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

No.	Uraian IKU	Target IKU 2022	Satuan Indikator	Capaian IKU Setiap Tahun			Ket
				2020	2021	2022	
1.	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan Kategori A	10,42 (5 OPD)	%	2,08% (1 OPD)	2,08% (1 OPD)	18,75% (9 OPD)	
2.	Nilai Maturitas SPIP	3,20	Level	Level 3,10	Level 3,10	Level 3,20	

2.5. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan Perjanjian Kinerja guna mendukung keberhasilan Visi dan Misi Gubernur terpilih adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penilaian capaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Komponen	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 88 Tahun 2021

3.1.a Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta target dan capaian realisasinya seperti yang terlihat pada tabel 3.2 yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.a
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan Kategori A	% (PD)	10,42 % (5 PD)	18,75% (9 PD)	179.94	Evaluasi SAKIP
		Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,20	3,20	100	BPKP

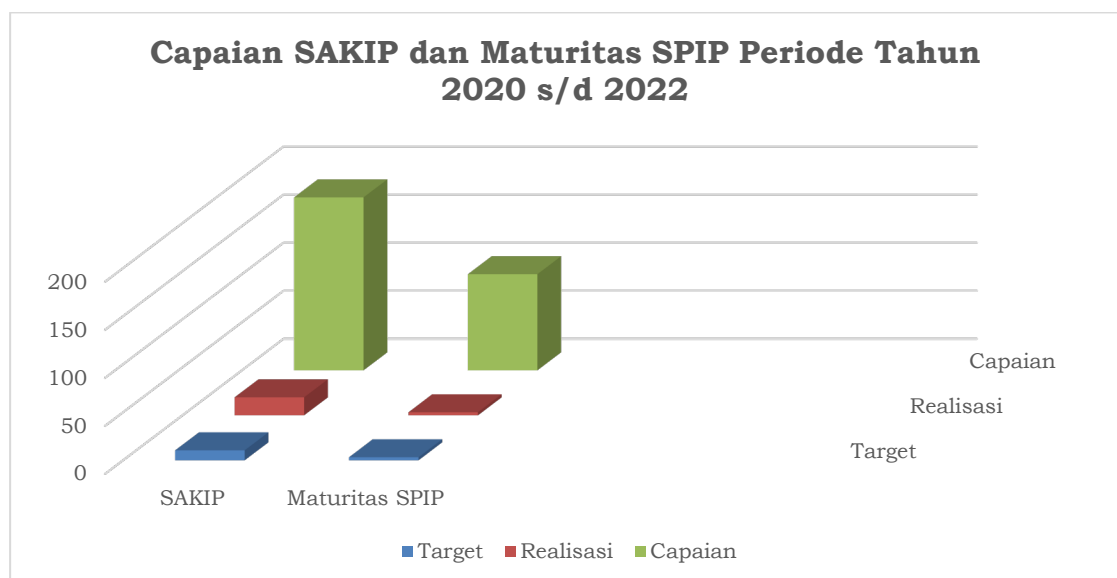
Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (Dua) indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan 2 (Dua) indikator kinerja tersebut diatas maka akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana nilai persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah memiliki Target sebesar 10,42 % dengan Kategori A sebanyak 5 Perangkat Daerah pada Tahun 2022 hal ini bertujuan untuk meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selama ini hanya mencapai kategori B sehingga Insepktorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen dalam hal peningkatan nilai atau capaian kategori Perangkat Daerah menuju kategori A hal ini dimulai pada Tahun 2022 sehingga target yang telah ditentukan diatas dapat

dicapai dan hal tersebut dapat dicapai bahkan melewati dari target yang ditentukan yaitu sebesar 18,75 % atau sebanyak 9 Perangkat Daerah mendapat nilai A dengan selisih realisasi sebesar 8,33 % atau capaian sebesar 179,94 % hal ini perlu di pertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga dari 48 Perangkat Daerah sisa 39 perangkat Daerah lagi yang perlu ditingkatkan nilai capaian melalui penguatan yang mana Perangkat Daerah yang masih bisa ditingkatkan dari segi nilai Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b. Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai salah satu daya dukung guna mencapai Reformasi Birokrasi yang ada di Perangkat Daerah khususnya di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maka dengan demikian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah berkomitmen untuk dapat meningkatkan level maturitas SPIP di Perangkat Daerah sehingga Adapun hasil SPIP pada tahun 2022 dari penilaian BPK dari target yang ditentukan yaitu berada dilevel 3,20 pada tahun 2022 dan realisasi berada dilevel 3,20 dengan capaian 100% hal ini masih perlu ditingkatkan guna mencapai level yang lebih baik lagi untuk ke depannya.

Dari uraian diatas dapat ditampilkan Charts Tabel sebagai berikut :



3.1.b. Perbandingan Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan perbandingan capaian kinerja dengan capaian Indikator kinerja selama 3 (Tiga) Tahun kebelakang mulai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 adapun perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.b
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Pada Tahun 2020 s/d 2022

No.	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target IKU 2022	Satuan Indikator	Capaian IKU Setiap Tahun			Ket
				2020	2021	2022	
1.	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan Kategori A	10,42 (5 PD)	%	2,08% (1 PD)	2,08% (1 PD)	18,75% (9 PD)	
2.	Nilai Maturitas SPIP	3,20	Level	Level 3,10	Level 3,10	Level 3,20	

Pada Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Dapat dilihat pada tabel 3.1.b. Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah adalah 2 (Dua) IKU yaitu 1. Persentase Nilai Sakip Perangkat daerah dengan Kategori A. Dimana Pada Tahun 2020 hanya 1 (Satu) Perangkat Daerah yang dapat kategori A dengan target 2,08% dari 48 Perangkat Daerah begitu pula pada Tahun 2021 Perangkat Daerah hanya 1 Perangkat Daerah yang mendapat kategori A sehingga pada Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menargetkan 5 Perangkat Daerah yang akan mencapai kategori A sehingga pada akhir evaluasi didapatkan 9 (Sembilan) Perangkat Daerah yang mencapai kategori A dari target yang ditentukan hal ini akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan diakhir rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah SAKIP dengan kategori A mencapai 48 (Empat Puluh Delapan) Perangkat Daerah di tahun 2026.

2. Pada Tabel 3.1.b pada IKU ke 2 (Dua) yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yaitu Pada Tahun 2020 Insepktorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya mencapai level 3,10 oleh penilaian BPKP sehingga upaya meningkatkan terus dilakukan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia serta minimnya Anggaran yang tersedia sehingga menghambat capaian Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah pada Tahun berikutnya pun yaitu pada Tahun 2021 Nilai Maturitas SPIP masih dilevel yang sama yaitu 3,10 sehingga Komitmen Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan capaian Nilai Maturitas SPIP dengan segala upaya pada Tahun 2022 bisa mencapai level 3,20 yakni naik sebesar 0,10 dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Perlunya integritas, komitmen dan kerjasama yang baik dalam meningkatkan level maturitas SPIP dimasa yang akan datang.

3.1.c Membandingkan Realisasi Kinerja sampai Tahun ini, dengan Target Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu memenuhi ekspektasi terhadap target dan capaian rencana strategis tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan. Kemajuan capaian sasaran strategis ini dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.c Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Jangka Menengah 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 =4/5*100
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)/ Persentase Nilia SAKIP Perangkat Daerah Kategori A	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan Kategori A	9 PD	16 PD	56 %
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)/ Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3,20	Level 3,40	94,12 %

Pada tabel diatas dapat dilihat kemajuan capaian sasaran strategis Inspektorat ada beberapa Indikator kinerja utama yang melampaui dan serta mencapai target adapun indikator-indikator yang masih bisa ditingkatkan guna mempercepat mencapai target adalah sebagai berikut :

1. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kategori A hingga saat mencapai 9 (Sembilan) Perangkat Daerah hal ini melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 10,42 persen menjadi 18,75 % hal ini tidak menutup kemungkinan pada Tahun 2023 Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat meningkat dengan signifikan mengingat Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah sudah memahami Tugas dan Fungsi Pokok Perangkat Daerah masing-masing sehingga dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah sudah sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan oleh setiap Perangkat Daerah sehingga apabila melihat tabel diatas untuk mencapai 16 Perangkat Daerah Kategori A memerlukan 35,25 % sedangkan untuk dari total 48 Perangkat Daerah atau 100% pada akhir masa renstra yaitu pada Tahun 2026, agar dapat mencapai target tersebut diperlukan Kerjasama yang baik antara Perangkat Daerah dan Instansi terkait guna peningkatan kapasitas capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah.
2. Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai kategori 3,20 sesuai dengan target yang ditetapkan akan tetapi dengan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pencapaian realisasi kinerja guna menunjang kinerja Pemerintah Provinsi sehingga diharapkan pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai hasil atau target yang ditetapkan sebesar 3,40 hal ini sejalan dengan komitmen bersama dalam hal Pengendalian Intern Pemerintah guna kesadaran bersama untuk

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Perangkat Daerah melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Pada saat ini belum ada nilai persentase SAKIP di tingkat Nasional mengingat pemeriksaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan dilaksanakan setelah tahun berkenaan sehingga perbandingan realisasi untuk saat ini belum ada.

3.1.e Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada saat laporan ini dibuat dari hasil Analisa yang ada bahwa keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah dalam hal Nilai Persentase SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A melebihi dari Target disebabkan oleh adanya Komitmen Bersama dengan Kepala Perangkat Daerah guna Peningkatan Capaian Kinerja serta pengelolaan keuangan dan asset yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun solusi alternative untuk keseluruhan OPD adalah inspektorat membuka layanan kepada seluruh OPD untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam hal kebijakan maupun penatausahaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku baik secara tatap muka maupun secara online via zoom terhadap masing-masing wilayah obyek pemeriksaan.

3.1.f. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan penunjang keberhasilan kegiatan adalah sebagai berikut :

LKIP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

No.	IKU	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi	%	Ket
1	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kategori A	Penyelenggaraan Pengawasan	Reviu Laporan Kinerja / Evaluasi SAKIP OPD	100 %	112.500.000,00	102.000.000,00	90,66	
2	Nilai Maturitas SPIP	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi / Evaluasi SPIP	100 %	111.000.000,00	110.400.000,00	99,45	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi / Penjamin Kualitas SPIP	100%	49.950.000,00	49.950.000,00	100,00	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan ada 2 (Dua) Program, 3 (Tiga) Sub Kegiatan adapun anggaran yang telah diberikan masih kurang memadai sehingga target yang ada dapat dicapai namun hanya berskala sebagai evaluasi pelaporan kinerja dimana tahap pembinaan Inpektorat tidak berjalan secara berkala sehingga pembinaan yang seharusnya berjalan di awal tahun hanya dilaksanakan melalui evaluasi pelaporan setiap akhir tahun atau tahun berikutnya akan tetapi walaupun anggaran yang terbatas dengan komitmen Inspektorat tetap melakukan pendampingan dan pembinaan guna peningkatan kapasitas pencapaian kinerja setiap Perangkat Daerah.

3.2 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp. 25.233.154.401,00 total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan/Sub kegiatan sebesar Rp. 24.625.650.361,- (97,59 persen) sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 607.504.040,- (2,41 Persen).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran saat ini sudah memadai tetapi masih banyak tugas mandatori yang belum terakomodir ke dalam program / kegiatan / sub kegiatan sehingga masih sangat kurang, hal ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak terutama bagi pengambil kebijakan sehingga kinerja Inspektorat dimasa yang akan datang lebih baik.

Efisiensi Anggaran untuk penunjang IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

No.	IKU	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	Ket
1	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kategori A	Penyelenggaraan Pengawasan	Reviu Laporan Kinerja / Evaluasi SAKIP OPD	100 %	112.500.000	102.000.000	90,67	9,33	
2	Nilai Maturitas SPIP	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi / Evaluasi SPIP	100 %	111.000.000	110.400.000	99,45	0,55	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi / Penjamin Kualitas SPIP	100%	49.950.000	49.950.000	100	-	

Dari tabel diatas dapat diasumsikan bahwa tingkat capaian efisiensi anggaran berdasarkan IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu berada ditren positif sehingga capaian kinerja dengan efisiensi anggaran berjalan secara sesuai dimana target IKU yang ditetapkan mencapai target bahkan target persentase Nilai SAKIP Kategori A melebihi dari target yang ditentukan yang semula hanya 5 Perangkat Daerah menjadi 9 Perangkat Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.2 berikut di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.126.530.876,00	20.804.546.024,00	98,47
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.113.450,00	71.988.450,00	88,75
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.148.450,00	71.988.450,00	90,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.965.000,0	1.965.000,00	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.737.085.164,00	15.505.720.560,00	98,52
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.583.205.164,00	15.351.840.560,00	98,51
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	153.880.000,00	153.880.000,00	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88.010.000,00	87.410.000,00	99,31
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	88.010.000,00	87.410.000,00	99,31
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	694.812.875,00	667.542.088,00	96,07
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	125.250.000,00	122.580.000,00	97,86
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	507.063.075,00	487.562.288,00	96,15
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.499.800,00	57.399.800,00	91,83

**LKIP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

No.	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	901.734.096,00	892.970.694,00	99,02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.810.846,00	5.788.806,00	99,62
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.152.250,00	17.050.325,00	89,02
	Penyediaan Bahan/Material	198.000.000,00	198.000.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.771.000,00	672.131.563,00	99,02
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.074.470.650,00	2.064.978.981,00	99,54
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.074.470.650,00	2.064.978.981,00	99,54
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.864.641,00	1.271.775.251,00	97,24
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	343.055.256,00	326.337.224,00	95,12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	964.809.385,00	945.438.027,00	97,99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.440.000,00	240.195.000,00	99,48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.050.000,00	158.272.000,00	99,51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.390.000,00	61.931.000,00	99,26
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.992.000,00	99,96
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.408.565.675,00	3.160.674.925,00	92,72
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.319.068.425,00	3.107.777.675,00	93,63
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	118.908.000,00	115.158.000,00	96,84
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120.213.625,00	115.863.625,00	96,38
	Reviu Laporan Kinerja	863.745.500,00	838.845.500,00	97,11
	Reviu Laporan Keuangan	1.246.888.450,00	1.183.848.450,00	94,94
	Kerjasama Pengawasan Internal	187.707.225,00	75.671.475,00	40,31
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	781.605.625,00	778.390.625,00	99,02
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	89.497.250,00	52.897.250,00	59,10
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	89.497.250,00	52.897.250,00	59,10

No.	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	698.057.850,00	660.429.412,00	94,60
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	144.726.900,00	121.576.900,00	84,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	144.726.900,00	121.576.900,00	84,00
	Pendampingan dan Asistensi	553.330.950,00	538.852.512,00	97,38
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	339.963.925,00	332.913.925,00	97,92
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	181.554.025,00	177.875.587,00	97,97
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	31.813.000,00	28.063.000,00	88,21
	Jumlah	25.233.154.401,00	24.625.650.361,00	97,59

Dari tabel diatas dapat pula disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan capaian realisasi berjalan sesuai dengan target, realisasi dan capaian yang diinginkan yaitu capaian persentase mencapai 97,59 dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,41, hal ini dapat tercapai disebabkan oleh adanya Komitmen Bersama, kerja sama dan peningkatan SDM Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan serta amanat Permendagri No. 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

3.3 Inovasi

Dalam rangka Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dituntut untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik sehingga dalam rangka meningkatkan peran dan layanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam rangka menunjang pembinaan dan pengawasan sehingga Inspektorat Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah berinisiatif membuat terobosan dengan semakin majunya teknologi di era modern ini serta mengingat keterbatasan anggaran dan kemampuan SDM Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum memadai maka Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan Program e-Pengawasan dan e-TLHP aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan secara berkala untuk aplikasi e-Pengawasan ini yaitu semua pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan asset diupload di aplikasi e-pengawasan guna pembinaan dan pengawasan berkala secara berkesinambungan sehingga parameter pelaporan dan evaluasi oleh Inspektorat berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku, Adapun aplikasi e-TLHP adalah aplikasi untuk Perangkat Daerah mengetahui apa saja temuan dan rekomendasi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah guna penyelesaian hasil pemeriksaan baik temuan BPK RI, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, maupun Insepktorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.4 Penghargaan

Penghargaan yang telah diterima saat ini oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai 10 Provinsi yang tepat waktu dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri Tahun 2019 yang diberikan pada Tahun 2021.

BAB. IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (Dua) sasaran, dan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran.

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke 2 (Kedua) rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Dalam kurun waktu pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut masih ada yang belum mencapai target dan menemui hambatan sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas APIP di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum memadai disebabkan formasi rekrutmen calon auditor dan PPUPD/aparat pengawas/pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang masih membutuhkan fungsional Auditor

dan PPUPD/Aparat Pengawas, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja.

2. Kurangnya keikutsertaan Auditor dan PPUPD untuk mengikuti Sosialisasi dan Diklat-diklat yang menunjang intuisi dari pada seorang Auditor dan PPUPD tersebut, karena disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk peningkatan Sumber Daya dari Auditor dan PPUPD tersebut.
3. Masih kurangnya perhatian dari OPD dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan baik itu pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri maupun temuan Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Masih kurangnya SDM ASN di Lingkup Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam memahami Tugas dan Fungsi dalam menerapkan Kebijakan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Kurangnya fungsi pengawasan atasan langsung terhadap bawahan serta evaluasi kinerja secara berkala.

Terhadap hambatan tersebut diatas, perlu adanya penyelesaian yaitu :

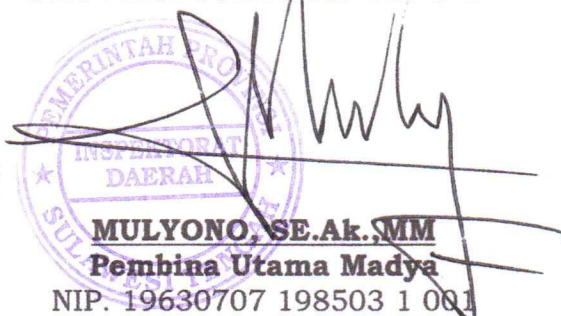
1. Komitmen Pimpinan sangat dibutuhkan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan, serta pengusulan formasi rekrutmen pegawai menjadi fungsional auditor maupun PPUPD.
2. Perlunya kerjasama antar stakeholder dalam hal Diklat / Bimtek guna Peningkatan SDM Fungsional Auditor maupun PPUPD.
3. Adanya komitmen dan perhatian para kepala PD dalam mempercepat proses penyelesaian temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dengan cara berkoordinasi dengan aparat pengawas internal dan membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang ada di PD.
4. Perlunya Penambahan Anggaran kepada Inspektorat dalam hal peningkatan SDM APIP.
5. Perlunya fungsi pengawasan atasan langsung terhadap mengontrol dan meminimalisir kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan anggaran yang dikelola.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta adanya solusi dari masalah selama 1 (satu) tahun kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 17 Februari 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MULYONO, SE.Ak., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

L A M P I R A N

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. MUCHLIS., MM**

Jabatan : Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RUSDY MASTURA**

Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 25 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR

PROVINSI SULAWESI TENGAH


RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,

INSPEKTUR

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A	10,42% (5 OPD)
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3,20

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 18.110.892.907,-	APBD
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.188.093.275,-	APBD
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 553.830.450,-	APBD
Jumlah	Rp. 21.852.816.632,-	

Palu, **25** Februari 2022

GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RUSDY MASTURA

INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. M. MUCHLIS., MM**

Jabatan : Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

**INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19710222 199012 1 001

PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660704 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks 62
2.	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	75 %
		Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri	86 %
		Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	77 %
3.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

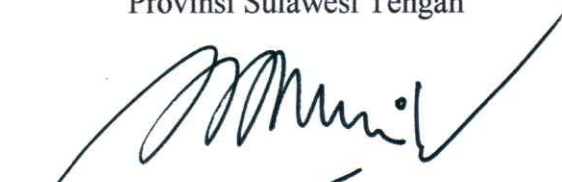
Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 18.110.892.907,-	
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 922.413.275,-	
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 327.330.450,-	
Jumlah	Rp. 19.360.636.632,-	

Palu, 1 Maret 2022

Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001

Sekretaris
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660704 199803 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SALIM, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **IRBAN WILAYAH I Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. M. MUCHLIS., MM**

Jabatan : **Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

**INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19710222 199012 1 001

PIHAK PERTAMA,

**IRBAN WILAYAH I
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina. IV/a
NIP. 19721212 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	51,28 %
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 580.000.000,-	
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 61.500.000,-	
Jumlah	Rp. 641.500.000,-	

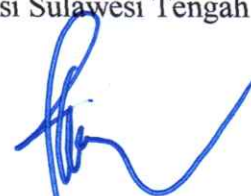
Palu, 1 Maret 2022

Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001

Irban Wilayah I
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina. IV/a
NIP. 19721212 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DISTYAWATY, SH.,MM**

Jabatan : **IRBAN WILAYAH II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. M. MUCHLIS., MM**

Jabatan : **Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

**INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19710222 199012 1 001

PIHAK PERTAMA,

**IRBAN WILAYAH II
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


DISTYAWATY, SH., MM
Penata Tkt. I, III/d
NIP. 19750910 200903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	51,28 %
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 576.470.000,-	
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 54.000.000,-	
Jumlah	Rp. 630.470.000,-	

Palu, 1 Maret 2022

Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Irban Wilayah II
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001


DISTYAWATY, SH., MM
Penata Tkt. I, III/d
NIP. 19750910 200903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MAULANA AMIR M.SAINALLAH, M.Si**

Jabatan : **IRBAN WILAYAH II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. M. MUCHLIS., MM**

Jabatan : **Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Mei 2022

PIHAK KEDUA,

**INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19710222 199012 1 001

PIHAK PERTAMA,

**IRBAN WILAYAH II
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Drs. MAULANA AMIR M. SAINALLAH, M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19661231 199603 1 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH

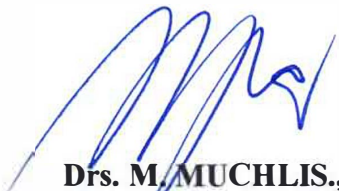
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	51,28 %
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 576.470.000,-	
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 54.000.000,-	
Jumlah	Rp. 630.470.000,-	

Palu, 13 Mei 2022

Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Irban Wilayah II
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001


Drs. MAULANA AMIR M. SAINALLAH, M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19661231 199603 1 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ATJO RIZAL, SH.,M.Si**

Jabatan : **IRBAN WILAYAH III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. M. MUCHLIS., MM**

Jabatan : **Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

**INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19710222 199012 1 001

PIHAK PERTAMA,

**IRBAN WILAYAH III
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

ATJO RIZAL, SH.,M.Si
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 19701210 199803 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	51,28 %
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 558.520.000,-	
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 57.000.000,-	
Jumlah	Rp. 615.520.000,-	

Palu, 1 Maret 2022

Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001

Irban Wilayah III
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



ATJO RIZAL, SH.,M.Si
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 19701210 199803 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARIS H.M SALIM, SE.,MM**

Jabatan : **IRBAN WILAYAH IV Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. M. MUCHLIS., MM**

Jabatan : **Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

**INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19710222 199012 1 001

PIHAK PERTAMA,

**IRBAN WILAYAH IV
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

HARIS H.M SALIM, SE.,MM
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660602 198603 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH

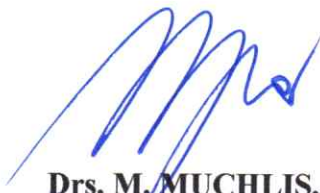
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	51,28 %
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 550.690.000,-	
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 54.000.000,-	
Jumlah	Rp. 604.690.000,-	

Palu, 1 Maret 2022

Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Urban Wilayah IV
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001



HARIS H.M SALIM, SE.,MM
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660602 198603 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset

Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660704 199803 2 003

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai 70
	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
	- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
2.	Meningkatnya Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	98 %
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Org/bln
	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
3.	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan
	- Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan
4.	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4 Laporan
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya Bahan/Material	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
5.	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit
6.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan
7.	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 81.113.450,-	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 79.148.450,-	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.965.000,-	
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 15.021.747.245,-	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 14.867.867.245,-	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 153.880.000,-	
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 76.710.000,-	
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 76.710.000,-	
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 497.598.921,-	
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.810.846,-	
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 13.483.075,-	
- Penyediaan Bahan/Material	Rp. 195.000.000,-	
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 283.305.000,-	
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 467.142.650,-	
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 467.142.650,-	
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.311.004.641,-	
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 342.455.256,-	
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 968.549.385,-	
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 180.860.000,-	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 129.300.000,-	
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 41.560.000,-	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 10.000.000,-	
Jumlah	Rp. 17.636.176.907,-	

Palu, 1 Maret 2022

Sekretaris
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660704 199803 2 003

Kepala Sub Bagian Program, Keuangan
Dan Aset Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI SARINTAN , S.Sos., MM**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 Maret 2022

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660704 199803 2 003

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SRI SARINTAN , S.Sos., MM
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks 80
	- Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang
	- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	595 Orang

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 84.600.000,-	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 330.116.000,-	
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Rp. 60.000.000,-	
Jumlah	Rp. 474.716.000,-	

Palu, 1 Maret 2022

Sekretaris
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660704 199803 2 003

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


SRI SARINTAN, S.Sos., MM
Pembina. IV/a
NIP.19730106 199203 2 003

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 (sampai dengan Triwulan IV)**

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sd. RKPD Provinsi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RRJMD Provinsi sd. Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RRJMD Provinsi sd. Tahun 2026 (%)	
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=7+13		15=13/8 x 100%		16=14/6 x 100%										
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																								
		6 01		INSPEKTORAT DAERAH																								
1	- Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah	6 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks	70,05	27.334.330.000	60	17.852.467.064	62	21.126.530.876	-	2.002.604.048	-	6.611.737.128	-	4.824.594.740	-	7.365.610.108	-	20.804.546.024	60	38.657.013.088	-	98,48	85,65	141,42
		6 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai	86	750.000.000	65	129.548.975	70	81.113.450	-	-	-	30.373.450	71,74	40.830.000	-	2.750.000	71,74	73.953.450	71,74	203.502.425	102	91,17	83,42	27,13
	- Meningkatkan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	6 01 01 1.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	600.000.000	4	114.084.875	6	79.148.450	3	-	1	30.168.450	-	39.070.000	2	2.750.000	6	71.988.450	10	186.073.325	100	90,95	166,67	31,01
		6 01 01 1.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	150.000.000	4	15.464.100	2	1.965.000	1	-	1	205.000	-	1.760.000	-	-	2	1.965.000	6	17.429.100	100	100	150,00	11,62
		6 01 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	98	20.289.037.623	98	13.864.286.639	98	15.737.085.164	11	1.706.260.062	35	5.465.764.811	25	4.004.136.141	28	4.329.559.546	98,53	15.505.720.560	98,53	29.370.007.199	101	98,53	100,54	144,76
		6 01 01 1.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Blm	115	19.889.037.623	12	13.703.380.389	115	15.583.205.164	115	1.684.613.062	115	5.417.461.811	115	3.956.176.141	115	4.293.589.546	460	15.351.840.560	472	29.055.220.949	400	98,52	410,43	146,09
		6 01 01 1.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	400.000.000	2	160.906.250	1	153.880.000	1	21.647.000	-	48.303.000	-	47.960.000	-	35.970.000	1	153.880.000	3	314.786.250	100	100	150,00	78,70
		6 01 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	300.000.000	2	100.907.250	2	88.010.000	0	8.547.000	1	14.353.000	-	18.320.000	1	46.190.000	2	87.410.000	4	188.317.250	100	99,32	200,00	62,77
		6 01 01 1.03 05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	300.000.000	2	100.907.250	2	88.010.000	0	8.547.000	1	14.353.000	-	18.320.000	1	46.190.000	2	87.410.000	4	188.317.250	100	99,32	200,00	62,77
		6 01 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	92	1.150.000.000	76,61	359.790.606	80	694.812.875	0	24.956.250	-	127.167.500	-	134.793.050	-	380.625.288	-	667.542.088	76,61	1.027.332.694	-	96,08	83,27	89,33
		6 01 01 1.05 04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	250.000.000	1	48.164.700	1	125.250.000	0	-	-	24.350.000	-	2.200.000	1	96.030.000	1	122.580.000	2	170.744.700	100	97,87	100,00	68,30
		6 01 01 1.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	600.000.000	2	261.976.156	48	507.063.075	0	1.443.750	6	86.723.750	14	117.299.300	28	282.095.488	48	487.562.288	50	749.538.444	100	96,15	166,67	124,92
		6 01 01 1.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	850	300.000.000	1	49.649.750	595	62.499.800	255	23.512.500	170	16.093.750	170	15.293.750	-	2.499.800	595	57.399.800	596	107.049.550	100	91,84	70,12	35,68
		6 01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	4	1.150.000.000	4	474.244.144	4	901.734.096	0,75	80.620.976	1,75	152.604.605	0,75	240.611.320	0,75	419.133.793	4	892.970.694	8	1.367.214.838	100	99,03	200,00	118,89
		6 01 01 1.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	8.303.676	1	5.810.846	0	-	1	5.788.806	-	-	-	-	1	5.788.806	2	14.092.482	100	99,62	200,00	28,18
		6 01 01 1.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	15.009.700	1	19.152.250	0,25	900.000	0,25	3.817.400	0,25	4.163.750	0,25	8.169.175	1	17.050.325	2	32.060.025	100	89,03	200,00	64,12
6 01 01 1.06 07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	450.000.000	1	225.000.000	1	198.000.000	0,25	48.750.000	0,25	48.750.000	0,25	48.750.000	0,25	51.750.000	1	198.000.000	2	423.000.000	100	100	200,00	94,00		
6 01 01 1.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	600.000.000	1	225.930.768	1	678.771.000	0,25	30.970.976	0,25	94.248.399	0,25	187.697.570	0,25	359.214.618	1	672.131.563	2	898.062.331	100	99,02	200,00	149,68		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sd. RKPD Provinsi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2026 (%)								
									I	II		III		IV															
2		6 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	600.008.927	1	1.331.299.150	1	2.074.470.650	0		-	0,33	419.929.581	-		-	0,67	1.645.049.400	1	2.064.978.981	2	3.396.278.131	100	99,54	200,33	566,04
		6 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	600.008.927	1	1.331.299.150	189	2.074.470.650	0		-	19	419.929.581	-		-	170	1.645.049.400	189	2.064.978.981	190	3.396.278.131	100	99,54	19000	566,04
		6 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2.039.485.487	2	1.131.307.700	2	1.307.864.641	0,50	181.269.760	0,50	316.362.231	0,50	327.039.069	0,50	447.104.191	2	1.271.775.251	4	2.403.082.951	100	97,24	200,00	117,83		
		6 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	400.000.000	12	323.378.155	12	343.055.256	3	63.529.760	3	87.316.102	3	82.302.371	3	93.188.991	12	326.337.224	24	649.715.379	100	95,13	200,00	162,43		
		6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1.639.485.487	1	807.929.545	1	964.809.385	0,25	117.740.000	0,25	229.046.129	0,25	244.736.698	0,25	353.915.200	1	945.438.027	2	1.753.367.572	100	97,99	200,00	106,95		
		6 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	1.055.797.963	3	461.082.600	3	241.440.000	0	950.000	1,25	85.181.950	0,25	58.865.160	1,50	95.197.890	3	240.195.000	6	701.277.600	100	99,48	200,00	66,42		
		6 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	400.000.000	1	116.371.600	13	159.050.000	0	950.000	9	59.920.950	5	50.465.160	8	46.935.890	13	158.272.000	14	274.643.600	100	99,51	1400,00	68,66		
		6 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	1	100.000.000	1	41.768.000	74	62.390.000	0	-	20	15.265.000	8	8.400.000	46	38.266.000	74	61.931.000	75	103.699.000	100	99,26	7500,00	103,70		
		6 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	555.797.963	3	302.943.000	1	20.000.000	0	-	0,50	9.996.000	-	-	0,50	9.996.000	1	19.992.000	4	322.935.000	100	99,96	133,33	58,10		
		6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	83	1.642.630.000	73	2.400.418.400	75	3.408.565.675	0	1.065.395.000	0	607.482.100	0	540.027.300	66	947.770.525	66	3.160.674.925	139	5.561.093.325	88	92,73	167,47	338,55		
				Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	94		84	86	0	0	0	0	0	0	94	94	178	109	189,36									
				Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	92		74	77	0	0	0	0	0	0	75	75	149	97	161,96									
				Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	97,44		41,03	51,28	7,69	17,95	28,21	30,77	84,62	126	165	128,95												
		6 01 02 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	452	1.108.880.000	451	1.203.010.150	641	3.319.068.425	304	1.065.395.000	68	573.099.600	22	532.794.800	269	936.488.275	663	3.107.777.675	1.114	4.310.787.825	103	93,63	246,46	388,75		
		6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48	57.003.000	48	194.553.000	24	118.908.000	-	-	-	-	-	24	115.158.000,00	24	115.158.000	72	309.711.000	100	96,85	150,00	543,32			
		6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	192	57.003.000	48	2.628.000	74	120.213.625	-	-	48	51.619.725	-	1.239.450	26	63.004.450	74	115.863.625	122	118.491.625	100	96,38	63,54	207,87		
		6 01 02 1.01 03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	170	550.000.000	162	604.063.300	183	863.745.500	1	10.200.000	19	406.046.425	8	138.582.850	155	284.016.225	183	838.845.500	345	1.442.908.800	100	97,12	202,94	262,35		
		6 01 02 1.01 04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan	8	50.000.000	49	120.043.350	328	1.246.888.450	290	799.770.000	1	24.918.450	3	14.762.500	34	344.397.500	328	1.183.848.450	377	1.303.891.800	100	94,94	4712,50	2607,78		
		6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan	1	53.000.000	-	-	1	187.707.225	-	-	-	-	-	1	75.671.475	1	75.671.475	1	75.671.475	100	40,31	100,00	142,78			
		6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	33	341.874.000	144	281.722.500	31	781.605.625	13	255.425.000	0	90.515.000	11	378.210.000	29	54.240.625	53	778.390.625	197	1.060.113.125	171	99,59	596,97	310,09		
		6 01 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	18	533.750.000	364	1.197.408.250	7	89.497.250	0	-	4	34.382.500	1	7.232.500	2	11.282.250	7	52.897.250	371	1.250.305.500	100	59,10	2061,11	234,25		
		6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	8	33.750.000	48	236.875.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	48	236.875.000	-	-	-	600,00	701,85			
		6 01 02 1.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	500.000.000	316	960.533.250	7	89.497.250	0	-	4	34.382.500	1	7.232.500	2	11.282.250	7	52.897.250	323	1.013.430.500	100	59,10	3230,00	202,69		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RJMD Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sd. RKPD Provinsi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2026 (%)								
								I		II		III		IV														
3		6 01 03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMPIANGAN DAN ASISTENSI	Capaian Level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level	4	467.200.000	2	203.810.800	3	698.057.850	0	15.450.000	-	112.060.850	-	147.074.625	-	385.844.237	3	660.429.412	3	864.239.912	100	94,61	75,00	184,98
		6 01 03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	1	20.000.000	1	18.175.000	1	144.726.900	0	-	-	986.725	-	1.973.450	1	118.616.725	1	121.676.900	2	139.751.900	100	84,00	200,00	698,76
		6 01 03	1.01	01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi	1	20.000.000	1	18.175.000	1	144.726.900	0	-	-	986.725	-	1.973.450	1	118.616.725	1	121.676.900	2	139.751.900	100	84,00	200,00	698,76
		6 01 03	1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Laporan	69	447.200.000	254	185.635.800	110	853.330.960	0	15.450.000	4	111.073.825	81	148.101.175	68	267.227.512	110	538.882.512	364	724.488.012	100	97,38	527,54	162,01
		6 01 03	1.02	02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	48	152.178.527	244 Lap	56.803.500	48	339.963.925	48	15.450.000	48	23.700.000	48	119.075.525	48	174.688.400	48	332.913.925	48	389.717.425	100	97,93	100,00	256,09
		6 01 03	1.02	03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Kegiatan	11	155.569.750	8	94.644.000	11	181.554.025	0	-	3	80.623.825	2	18.087.650	6	79.164.112	11	177.875.587	19	272.519.557	100	97,97	172,73	175,18
		6 01 03	1.02	04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Perangkat Daerah	10	139.451.723	2	34.188.000	2	31.813.000	0	-	2	6.750.000	2	7.938.000	2	13.375.000	2	28.063.000	4	62.251.000	100	88,21	40,00	44,64
Jumlah							100	29.444.160.000	94	20.456.695.964	100%	25.233.154.401	12,22	3.083.449.048	29,05	7.331.279.775	21,84	5.511.696.665	34,48	8.699.224.870	97,59	24.625.650.361	191,59	45.082.346.325	97,59	97,59	191,59	153,11

Plt. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

MULYONO, SE Ak. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707-198503 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Bidang : Bidang Pengawasan
Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : Inspektorat Daerah

NO. KODE LOKASI : 11.01.20.00.14.01.01.01.2022

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.3.2.02.001.002.003	000009	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Honda BR-V E CVT / Prestige	MHRDG3880NJ303789	Besi	Pembelian	2022			Baik	1	347.600.000,00	
2	1.3.2.02.001.002.003	000010	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Honda BR-V E CVT / Prestige	MHRDG3880NJ308032	Besi	Pembelian	2022			Baik	1	347.600.000,00	
3	1.3.2.02.001.002.003	000011	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Honda BR-V E CVT / Prestige	MHRDG3880NJ308031	Besi	Pembelian	2022			Baik	1	347.600.000,00	
4	1.3.2.02.001.002.003	000012	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Honda BR-V E CVT / Prestige	MHRDG3880NJ308039	Besi	Pembelian	2022			Baik	1	347.600.000,00	
5	1.3.2.05.001.004.005	000059	Filing Cabinet Besi	Brother / Besi	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	3.500.000,00	Harga Satuan : 3.500.000,00 Harga Satuan : 3.500.000,00
6	1.3.2.05.001.004.005	000060 s/d 000069	Filing Cabinet Besi	Brother / Besi	-	-	Pembelian	2022			Baik	10	35.000.000,00	
7	1.3.2.05.001.004.005	000070 s/d 000072	Filing Cabinet Besi	Brother / Besi	-	-	Pembelian	2022			Baik	3	10.500.000,00	
8	1.3.2.05.001.005.002	000006	CCTV - Camera Control Television System	Ajhua / Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	15.125.150,00	
9	1.3.2.05.001.005.012	000004	Mesin Absensi	Solution / Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	10.312.500,00	Harga Satuan : 499.732,00 Harga Satuan : 4.705.541,00
10	1.3.2.05.002.001.030	000317 s/d 000416	Kursi Rapat	Brother	-	-	Pembelian	2022			Baik	100	49.973.200,00	
11	1.3.2.05.002.003.003	000004	Mesin Pemotong Rumput	Honda / Besi	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	5.850.000,00	
12	1.3.2.05.002.004.004	000069 s/d 000070	A.C. Split	Gree / 1/2 PK	-	-	Pembelian	2022			Baik	2	9.411.082,00	
13	1.3.2.05.002.006.038	000009	Dispenser	Sanken / Besi/Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	3.174.000,00	Harga Satuan : 4.300.000,00 Harga Satuan : 3.698.835,00
14	1.3.2.05.002.006.038	000010	Dispenser	Sanken / Besi/Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	3.174.000,00	
15	1.3.2.05.003.001.005	000001 s/d 000005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Kayu Daerah Kelas II / Kayu Lokal	-	-	Pembelian	2022			Baik	5	21.500.000,00	
16	1.3.2.05.003.001.008	000011 s/d 000021	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal / 1/2 Biro	-	-	Pembelian	2022			Baik	11	40.687.185,00	
17	1.3.2.05.003.001.008	000022	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal / 1/2 Biro	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	3.698.836,00	Harga Satuan : 2.497.500,00 Harga Satuan : 3.025.000,00
18	1.3.2.06.001.001.048	000001 s/d 000003	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC / Besi/Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	3	7.492.500,00	
19	1.3.2.06.002.001.006	000001 s/d 000005	Handy Talky (HT)	Icom / Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	5	15.125.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUKU INVENTARIS

20	1.3.2.10.001.002.002	000103 s/d 000115	Lap Top	MSI Modern / 14/9S7-14D334- 1059	-	-	Pembelian	2022			Baik	13	194.951.250,00	Harga Satuan : 14.996.250,00
21	1.3.2.10.001.002.002	000116	Lap Top	Lenovo / Besi/Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	26.362.500,00	
22	1.3.2.10.001.002.003	000007	Note Book	I PAD PRO	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	37.019.409,00	
23	1.3.2.10.001.002.010	000005 s/d 000007	Personal Komputer lainnya	Asus / Besi/Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	3	26.223.750,00	Harga Satuan : 8.741.250,00
24	1.3.2.10.001.003.001	000001	Komputer Unit Lainnya	MSI TRIDENT 3 / MS-B935	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	49.817.899,00	
25	1.3.2.10.002.003.003	000077 s/d 000086	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L3210	-	-	Pembelian	2022			Baik	10	34.370.720,00	Harga Satuan : 3.437.072,00
26	1.3.2.10.002.003.003	000087 s/d 000093	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3210 / Plastik/Besi	-	-	Pembelian	2022			Baik	7	23.310.000,00	Harga Satuan : 3.330.000,00
27	1.3.2.15.004.005.006	000001 s/d 000002	Air Conditioning (AC)	Daiken / Besi/Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	2	10.500.000,00	Harga Satuan : 5.250.000,00
28	1.3.2.15.004.005.006	000003	Air Conditioning (AC)	Daiken / Besi/Plastik	-	-	Pembelian	2022			Baik	1	37.500.000,00	
Jumlah													2.064.978.981,00	

MENGETAHUI

PIL. INSPEKTOR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MULYONO, SE.Ak.,MM

NIP. 19630707 198503 1 001

Palu, 31 Desember 2022

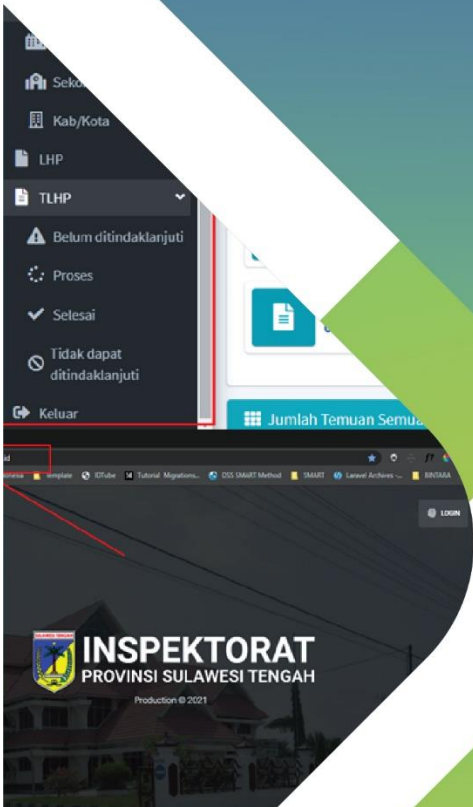
PENGURUS BARANG PENGGUNA

AHMAD AFANDI, S.Pi

NIP. 19830703 200604 1 004

TUTORIAL USER

E - TLHP INSPEKTORAT
SULTENG



INSPEKTORAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Production © 2021

entries
No
Kategori
Lokasi
Tanggal
Status
Aksi
AN KEMERAGUKAN DAERAH
N. SULTENG
nama : EMDPROV
AN PENGH
N. SULTENG
nama :



“TUTORIAL ADMIN OPD/SEKOLAH”

LOGIN :

1. Buka Web Browser seperti Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge Dll, kemudian masuk ke aplikasi E-TLHP melalui link <https://etlhp-inspektorat.sultengprov.go.id/> .



2. User melakukan login dengan memasukkan *Username* dan *Password*.

A screenshot of the login form on the E-TLHP website. The form is titled "SIGN IN" and is set against a dark blue background with the Inspectorate of Central Sulawesi logo. It contains two input fields: "USERNAME" with a placeholder "Username" and "PASSWORD" with a placeholder "Password". Below these fields is a blue button labeled "SIGN IN" with a right-pointing arrow icon.

3. Berikut tampilan halaman *Dashboard/Beranda* dari aplikasi E-Tlhp jika proses login sudah berhasil. Disini OPD dapat melihat berapa jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti, sementara proses, sudah selesai, dan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

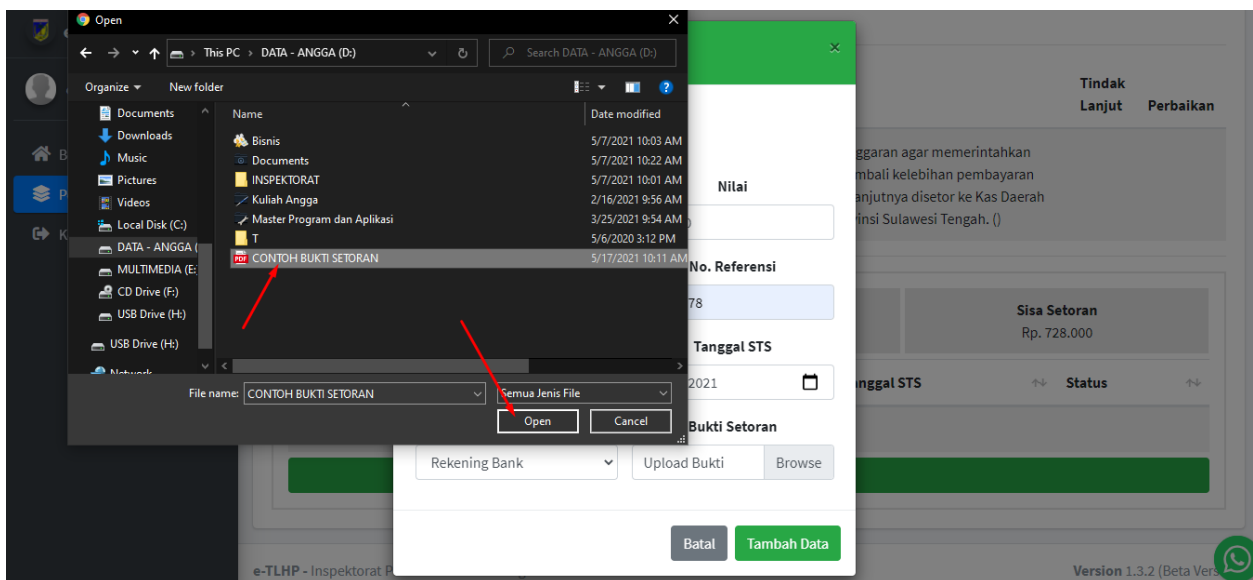
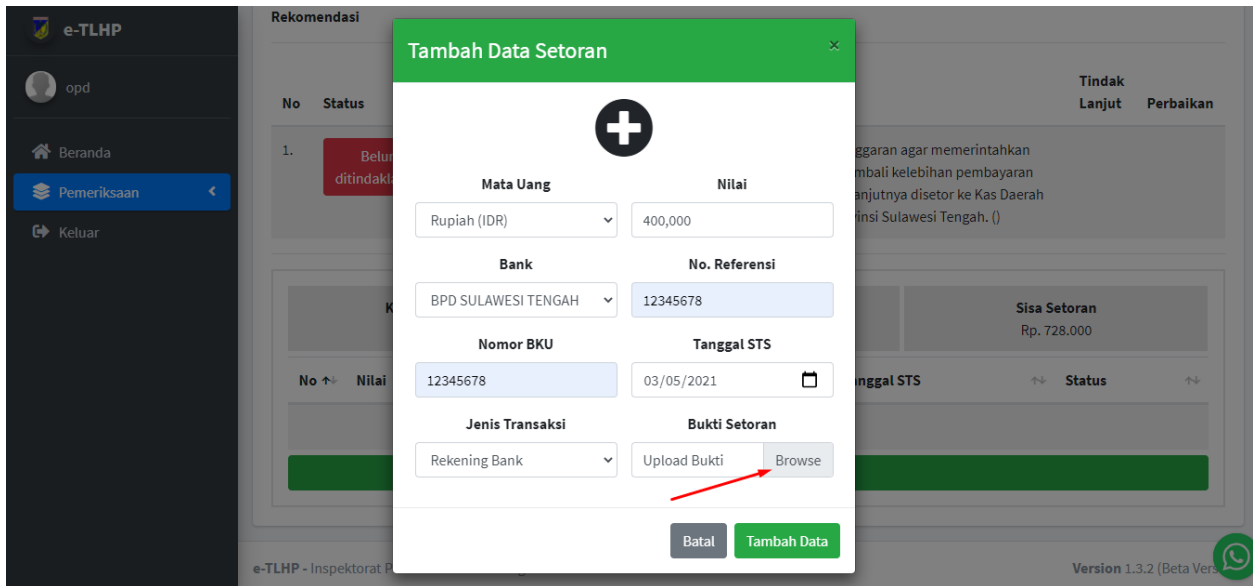


MENINDAKLANJUTI TEMUAN KEUANGAN :

1. Klik menu “Belum ditindaklanjuti” kemudian klik button warna merah “Belum ditindaklanjuti”. Temuan pertama yang akan ditindaklanjuti yaitu temuan keuangan.

2. Setelah itu klik tombol berwarna hijau “Tambah Setoran Kerugian Daerah”.

3. Untuk temuan keuangan, pengembalian setoran ke kas daerah dapat dilakukan secara berangsur. Seperti contoh dibawah ini jumlah setoran yang harus dibayar sebesar Rp. 728.000 dan OPD akan mengangsur 2 kali, angsuran pertama sebesar Rp. 400.000 dan angsuran kedua sebesar Rp. 328.000. Setelah data setoran sudah terisi dengan benar kemudian upload bukti setoran dengan meng-klik tombol Browse dan cari filenya.



4. Klik “Tambah Data” jika data setoran sudah terisi dengan lengkap.

5. Angsuran setoran pertama sebesar Rp. 400.000 telah berhasil dilakukan dan tinggal menunggu konfirmasi dari Admin Pemeriksa.

6. Penginputan angsuran ke dua dapat dilakukan tanpa harus menunggu angsuran pertama di konfirmasi oleh Admin pemeriksa.

e-TLHP

opd

Beranda

Pemeriksaan

Keluar

No	Status	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Perbaikan
1.	Menunggu Validasi	Disarankan kepada kepala Dinas Suka Maju selaku pengguna anggaran agar memerintahkan secara tertulis kepada bendahara pengeluaran agar menagih kembali kelebihan pembayaran biaya hotel kepada yang bersangkutan sebesar Rp. 728.000,- selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan Copy bukti setoran disampaikan ke Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. ()		

Kerugian Daerah		Jumlah Setoran	Sisa Setoran
Rp. 728.000		Rp. 728.000	Rp. 0

No	Nilai	Bank	Nomor BKU	Tanggal STS	Status
1	IDR 400.000	BPD SULAWESI TENGAH Rekening Bank (12345678)	12345678	03 Mei 2021	Menunggu Konfirmasi
2	IDR 328.000	BPD SULAWESI TENGAH Rekening Bank (12345678)	12345678	10 Mei 2021	Menunggu Konfirmasi

Tambah Setoran Kerugian Daerah

7. Temuan sudah selesai di verifikasi oleh admin pemeriksa.

e-TLHP

opd

Beranda

Pemeriksaan

Keluar

DISUMBER

LHP

Daftar LHP

Show 10 entries

Search:

1	Temuan Terdapat Kelebihan Pembayaran biaya Hotel sebesar Rp. 728.000,- Keuangan Kerugian Daerah Rp. 728.000 Rekomendasi Disarankan kepada kepala Dinas Suka Maju selaku pengguna anggaran agar memerintahkan secara tertulis kepada bendahara pengeluaran agar menagih kembali kelebihan pembayaran biaya hotel kepada yang bersangkutan sebesar Rp. 728.000,- selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan Copy bukti setoran disampaikan ke Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Setoran Selesai
---	--

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

MENINDAKLANJUTI TEMUAN ADMINISTRASI :

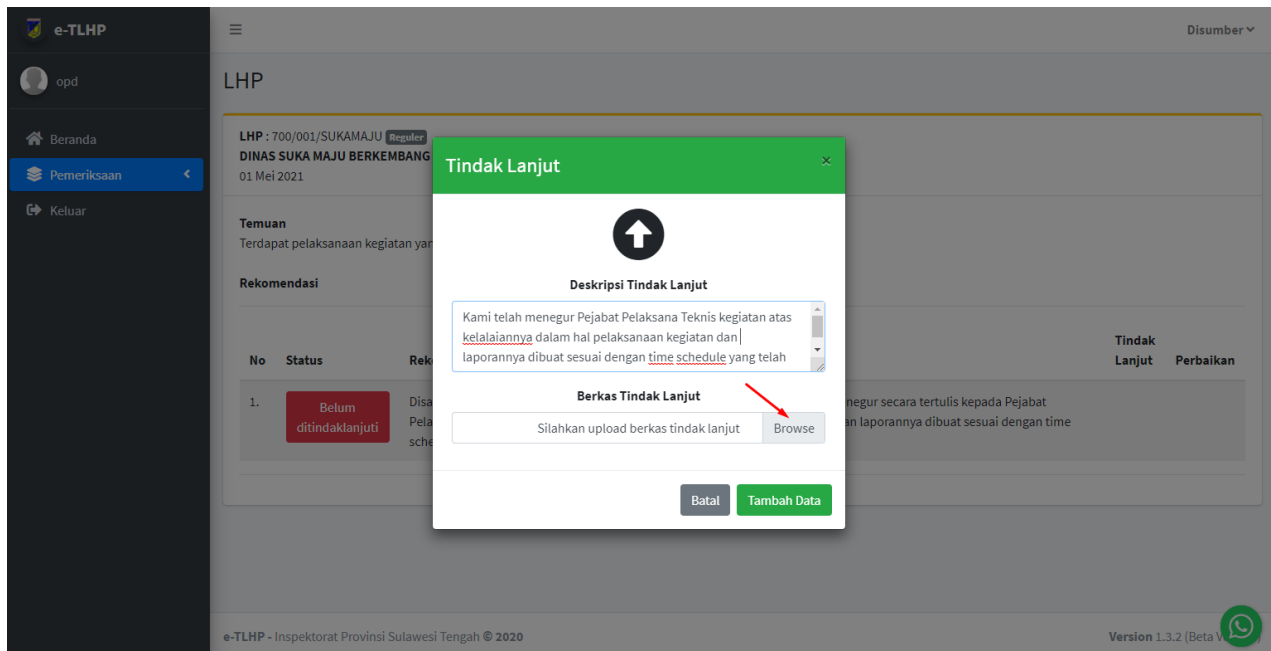
1. Klik menu “Belum ditindaklanjuti” kemudian klik button warna merah “Belum ditindaklanjuti”.

The screenshot shows the e-TLHP application interface. On the left sidebar, the 'Pemeriksaan' menu is expanded, and 'Belum ditindaklanjuti' is highlighted with a red box and an arrow. The main content area displays the 'Daftar LHP' (LHP List) screen. The first entry, 'Temuan', has a red button labeled 'Belum ditindaklanjuti' with an arrow pointing to it. The status is 'Administrasi'.

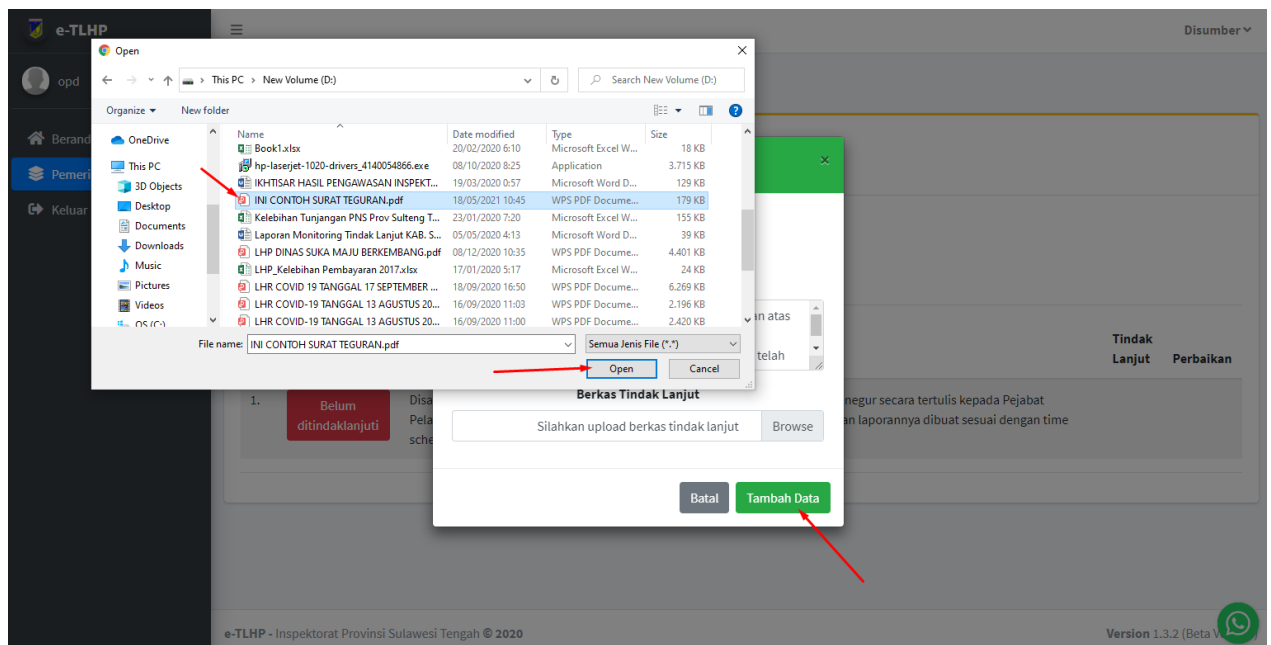
2. Selanjutnya klik tombol “Belum ditindaklanjuti”.

The screenshot shows the e-TLHP application interface. On the left sidebar, the 'Pemeriksaan' menu is highlighted with a red box and an arrow. The main content area displays the 'LHP' (LHP Detail) screen. The 'Status' column has a red button labeled 'Belum ditindaklanjuti' with an arrow pointing to it. The status is 'Administrasi'.

- Isi deskripsi tindak lanjut kemudian klik tombol “Browse” untuk meng-upload berkas tindak lanjutnya.



- Cari berkas tindak lanjut akan akan diupload setelah itu klik “Open” lalu klik “Tambah Data”



5. Tindak lanjut temuan telah berhasil dikirim dan selanjutnya menunggu konfirmasi dari admin pemeriksa.

e-TLHP DISUMBER

opd

Beranda

Pemeriksaan

Keluar

LHP

LHP : 700/001/SUKAMAJU **Regular**
DINAS SUKA MAJU BERKEMBANG
01 Mei 2021

Temuan
Terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum ada outputnya **Administrasi**

Rekomendasi

No	Status	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Perbaikan
1.	Proses	Disarankan kepada kepala Dinas Suka Maju selaku pengguna anggaran agar menegur secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan atas kelalaiannya dalam hal pelaksanaan kegiatan dan laporannya dibuat sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. ()	kami telah menegur Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan atas kelalaiannya dalam hal pelaksanaan kegiatan dan laporannya dibuat sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan	

e-TLHP - Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah © 2020

Version 1.3.2 (Beta V)

6. Klik menu “Perbaikan” untuk melihat apakah tindakanlanjut yang telah terkirim terdapat perbaikan atau sudah selesai.

e-TLHP DISUMBER

opd

Beranda

Pemeriksaan

Keluar

DINAS SUKA MAJU BERKEMBANG

Semua

Rekap TLHP Berdasarkan Status Rekomendasi Pada DINAS SUKA MAJU BERKEMBANG

Status	Jumlah
Belum ditindaklanjuti	0
Proses	1
Selesai	1
Tidak dapat ditindaklanjuti	0

Jumlah Kerugian Daerah

Jumlah Temuan

Version 1.3.2 (Beta V)

7. Kemudian klik tombol “Perbaikan”

The screenshot shows the e-TLHP application interface. On the left is a dark sidebar with the logo 'e-TLHP' and user information 'opd'. The main menu includes 'Beranda', 'Pemeriksaan' (highlighted in blue), and 'Keluar'. The main content area is titled 'LHP' and contains a section 'Daftar LHP'. It shows '10 entries' and a search bar. A single entry is displayed with the following details:

- 1 Temuan**: Terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum ada outputnya **Administrasi**
- Rekomendasi**: Disarankan kepada kepala Dinas Suka Maju selaku pengguna anggaran agar menegur secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan atas kelalaiannya dalam hal pelaksanaan kegiatan dan laporannya dibuat sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. **Non Setoran**
- Perbaikan**: A blue button with a red arrow pointing to it.

At the bottom, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and has 'Previous', '1', and 'Next' navigation links. The footer includes 'e-TLHP - Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah © 2020' and 'Version 1.3.2 (Beta V)' with a WhatsApp icon.

8. Perhatikan saran perbaikan yang diberikan oleh admin pemeriksa kemudian klik tombol “Perbaikan” untuk memperbaiki tindaklanjut temuan.

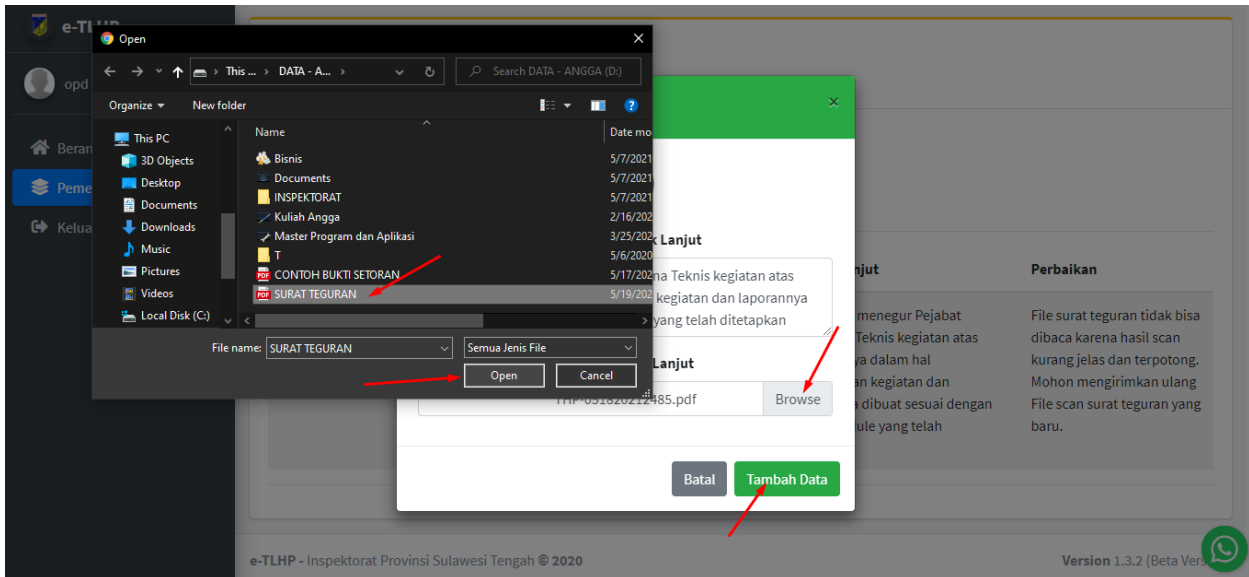
The screenshot shows the e-TLHP application interface. On the left is a dark sidebar with the logo 'e-TLHP' and user information 'opd'. The main menu includes 'Beranda', 'Pemeriksaan' (highlighted in blue), and 'Keluar'. The main content area displays details for a specific LHP entry:

- LHP**: 700/001/SUKAMAJU **Regular**
- DINAS SUKA MAJU BERKEMBANG**
- 01 Mei 2021**
- Temuan**: Terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum ada outputnya **Administrasi**
- Rekomendasi**: A table with the following columns: No, Status, Rekomendasi, Tindak Lanjut, and Perbaikan.

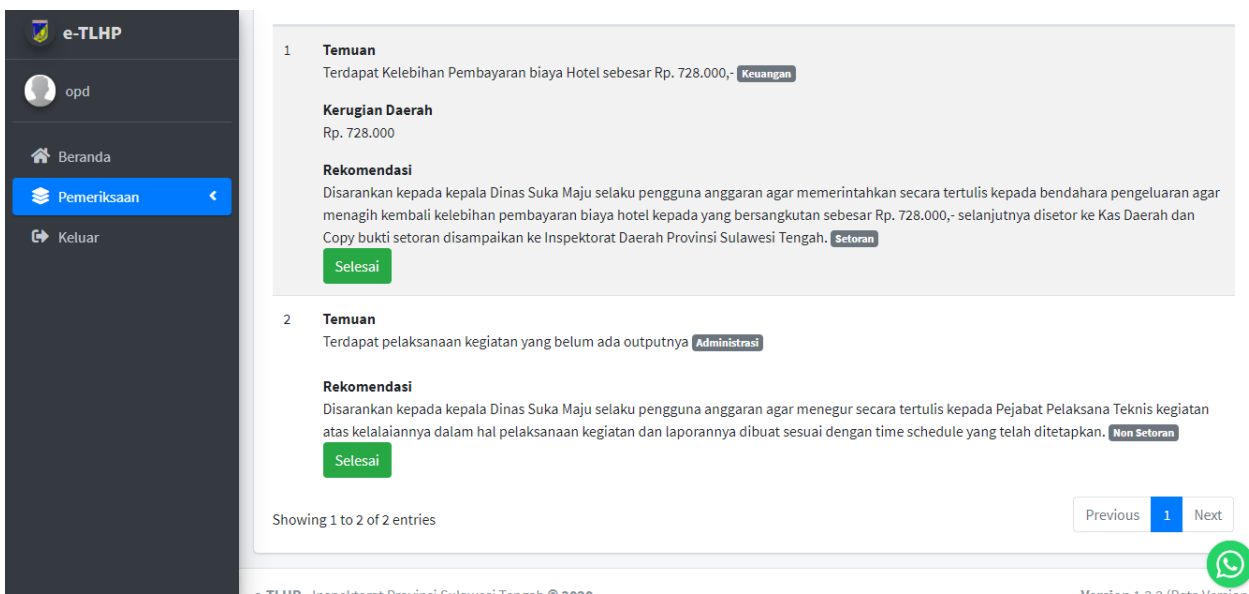
No	Status	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Perbaikan
1.	Perbaikan	Disarankan kepada kepala Dinas Suka Maju selaku pengguna anggaran agar menegur secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan atas kelalaiannya dalam hal pelaksanaan kegiatan dan laporannya dibuat sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. ()	kami telah menegur Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan atas kelalaiannya dalam hal pelaksanaan kegiatan dan laporannya dibuat sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan	File surat teguran tidak bisa dibaca karena hasil scan kurang jelas dan terpotong. Mohon mengirimkan ulang File scan surat teguran yang baru.

The 'Perbaikan' column contains a detailed suggestion for improvement, highlighted by a red box. The footer includes 'e-TLHP - Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah © 2020' and 'Version 1.3.2 (Beta V)' with a WhatsApp icon.

9. Setelah itu klik tombol “Browse” untuk mengupload berkas tindaklanjut. Pilih berkas yang akan diupload kemudian klik “Open” dan Klik “Tambah Data”.



10. Temuan telah selesai ditindaklanjuti.





Piagam Penghargaan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Memberikan Penghargaan Kepada :

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sebagai 10 Provinsi yang Tepat Waktu dalam Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019

Jakarta, April 2021

MENTERI DALAM NEGERI

Muhammad Tito Karnavian